



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MATAMIRA BANGGU KALE**
2. Jabatan : **KEPALA**
3. NHK : **142800**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.490.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/48 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 245 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 5046 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 361 m2/144 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
6. Tanah Seluas 775 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/120 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
8. Tanah Seluas 2590 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 96.500.000

1. MOTOR, SUZUKI FV 110 LI/SOLO Tahun 2017, HADIAH Rp. 10.500.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



3. MOTOR, HONDA ASTRA GRAND Tahun 1994, HASIL SENDIRI
Rp. 1.000.000

4. MOTOR, IZUZU PANTHER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.337.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 82.264.723

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.715.601.723

III. HUTANG Rp. 283.457.123

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.432.144.600

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.